



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 1959

TENTANG

PENARIKAN KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 13 TAHUN 1955

TENTANG PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NO. 14

TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 38)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 tentang pencabutan dan penggantian Undang-undang No. 14 tahun 1953 (Lembaran- Negara tahun 1955 No. 38);
 - b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 tersebut, perlu ditarik kembali, karena dianggap tidak perlu lagi, berhubung dengan berlakunya Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 83) jo. Undang-undang No. 19 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 60) tentang Militer Sukarela.

- Mengingat :
- a. pasal 89 dan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
 - b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENARIKAN KEMBALI
UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 13 TAHUN 1955 TENTANG
PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NO. 14
TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 38).

Pasal 1

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 tentang pencabutan dan penggantian Undang-undang No. 14 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 38) dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung mulai tanggal 10 Agustus 1957, dengan ketentuan bahwa bagi mereka yang pada saat Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 tentang Militer Sukarela (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 83.) ada dalam keadaan mendapat perlakuan berdasarkan Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 (Lembaran-Negara 1955 No. 38), tetap berlaku ketentuan dalam Undang-undang Darurat tersebut terakhir.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 26 Juni 1959.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,
ttd
SARTONO.

Diundangkan,
pada tanggal 4 Juli 1959.
Menteri Kehakiman,
ttd
G.A. MAENGKOM.

Menteri Pertahanan,
ttd
DJUANDA.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 69



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MEMORI PENJELASAN
PADA
UNDANG-UNDANG PENARIKAN KEMBALI UNDANG-UNDANG
DARURAT No. 13 TAHUN 1955 TENTANG PENCABUTAN
DAN PENGgantian UNDANG-UNDANG
No. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA
TAHUN 1955 No. 38).

1. Urgensi untuk mengeluarkan Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 38) telah jelas dengan segala sesuatu yang diuraikan dalam penjelasan pada Undang-undang Darurat tersebut.

Dalam teks Undang-undang Darurat NO. 13 tahun 1955, pun dalam penjelasannya, ditegaskan bahwa perlakuan menurut peraturan tersebut hanya ditujukan kepada mereka yang sudah diterima sebagai anggota Angkatan Perang sebelum 1 Januari 1953. (Menurut istilah Undang-undang No. 14 tahun 1953 "mereka dengan ikatan dinas tahun 1950").

2. Dalam tahun 1957 Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 tentang Militer Sukarela (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 83) dan peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut telah ditetapkan sebagai Undang-undang, yaitu Undang-undang No. 19 tahun 1958 tentang Militer Sukarela (Lembaran-Negara 1958 No. 60).

Oleh Undang-undang Darurat No. 1.6 tahun 1957, bagi golongan anggota tentara yang diterima dalam dinas tentara sebelum 1 Januari 1953 dan pada saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat tersebut masih ada dalam dinas tersebut, ditetapkan ketentuan-ketentuan yang menggambarkan suatu prosedur berlainan dengan yang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Undang-undang Darurat ini sejak saat berlakunya Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957, yaitu tanggal 10 Agustus 1957, tidak berlaku lagi.

Menurut ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menurut Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957, pada saat Undang-undang Darurat itu mulai berlaku, mereka dengan "ikatan dinas tahun 1950" dianggap sebagai militer sukarela menurut Undang-undang Darurat tersebut, yang telah menunaikan ikatan dinas pertama [pasal 20 ayat (1)]

Mereka diberi kelonggaran untuk mengajukan permohonan agar ikatan dinasnya diperpanjang [pasal 16 ayat (1)].

Dengan demikian maka tidak ada tempat bagi perlakuan sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955, sejak saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957.

3. Untuk memberi ketegasan tentang hal yang diuraikan dalam sub 2 diatas, maka dengan mengingat pula pada pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia diajukan rancangan Undang-undang ini, untuk menarik kembali Undang- undang Darurat No. 13 tahun 1955.

4. Bagaimana kedudukan mereka yang pada saat berlakunya Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 tentang Militer Sukarela berada dalam keadaan mendapat perlakuan menurut Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955?

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 20 ayat (4) Undang-undang Darurat tersebut pertama, bagi mereka tetap berlaku Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955, sudah barang tentu saat mereka diberhentikan dari dinas tentara menurut Undang-undang Darurat itu. Karena itu, vide perumusan dari pasal 1 Undang-undang ini.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

ttd

G. A. MAENGKOM.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1813.